

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Good Governance Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo

Brina Kusumaningsari^{1*}, Fadjar Harimurti²

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, Indonesia¹

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, Indonesia²

*Email Korespondensi: brinakusumaningsari231@gmail.com

Diterima: 10-09-2024 | Disetujui: 11-09-2024 | Diterbitkan: 12-09-2024

ABSTRACT

This study focuses on evaluating the impact of budget target clarity, accounting control practices, and the implementation of good governance on the level of performance accountability of government agencies within the Sukoharjo Regency regional apparatus. The quantitative approach is used as the basis for data collection and analysis. A purposive sampling technique was applied to determine the research sample. A total of 92 employees from regional apparatus organisations were involved as respondents in this study. Data collection was carried out through the distribution of questionnaires to all employees in the regional apparatus organisation of Sukoharjo Regency. Data analysis was carried out through a series of statistical tests, including descriptive tests, validity tests, reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression, t tests, F tests, and coefficient of determination tests. The results of the analysis show that there is a significant effect of budget target clarity, accounting control, and good governance implementation on improving the performance accountability of government agencies in the Sukoharjo Regency area.

Keywords: *Clarity of Budget Objectives; Accounting Controls; Good Governance; Accountability of Government Agency Performance*

ABSTRAK

Studi ini berfokus pada evaluasi dampak kejelasan sasaran anggaran, praktik pengendalian akuntansi, dan penerapan good governance terhadap tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan perangkat daerah Kabupaten Sukoharjo. Pendekatan kuantitatif digunakan sebagai landasan dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik purposive sampling diterapkan untuk menentukan sampel penelitian. Sebanyak 92 pegawai dari organisasi perangkat daerah terlibat sebagai responden dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui distribusi kuesioner kepada seluruh pegawai di lingkungan perangkat daerah Kabupaten Sukoharjo. Analisis data dilakukan melalui serangkaian uji statistik, meliputi uji deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi. Hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan penerapan good governance terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Katakunci: Kejelasan Sasaran Anggaran; Pengendalian Akuntansi; Good Governance; Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Kusumaningsari, B., & Harimurti, F. (2024). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Good Governance Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 402-413. <https://doi.org/10.62710/yx7my222>

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan otonomi daerah di Indonesia telah menjadi katalisator signifikan dalam percepatan evolusi Akuntansi Sektor Publik (ASP). Otonomi daerah, sebagai mekanisme pemberdayaan daerah, memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi entitas subnasional dalam merumuskan kebijakan fiskal dan mengelola aset daerah secara mandiri, sejalan dengan karakteristik serta kebutuhan spesifik masing-masing daerah. Menurut Mardiasmo (2018:11) menyatakan otonomi yang diberikan kepada Kabupaten/Kota dilakukan dengan memberikan kewenangan atau diskresi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah secara proporsional. Dalam konsep pemerintah yang baik maka akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dasar yang harus diterapkan agar penyelenggaraan pemerintah bisa berjalan dengan baik dan benar. Oleh karena itu sangatlah penting pada pemerintah menerapkan akuntabilitas dalam mengelola pemerintahan agar aparatur pemerintahan dapat mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan pelaksanaan kerjanya kepada publik, sehingga tujuan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Menurut Mardiasmo (2018) Akuntabilitas merujuk pada pertanggung jawaban atas segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan yang menjadi stakeholder. Hal ini dapat berupa memberikan, menyajikan, melaporkan kegiatan melalui laporan keuangan kepada prinsipal. Akuntabilitas juga diyakini bahwa dapat mengubah kondisi pemerintah yang tidak dapat memberikan layanan yang tidak baik. Jika penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel maka akan mendapat dukungan dari publik. Salah satu fenomena yang terjadi dalam pengembangan sektor publik di Indonesia saat ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Terkait akuntabilitas, kita dapat menemukan adanya aturan mengenai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagaimana diatur dalam Instruktur Presiden (Inpres) No. 7/1999 serta Keputusan Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 598/IX/6/Y/99 juncto Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003. Namun demikian, mekanisme akuntabilitas sebagaimana diatur oleh sejumlah peraturan tersebut belum memenuhi kriteria akuntabilitas publik.

Kasus lainnya yang terkait dengan akuntabilitas adalah kinerja pada kabupaten Sukoharjo dengan masalah hasil pada pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Jawa Tengah menempati peringkat terendah selama dua tahun berturut-turut. Pada tahun 2022 pemerintah kabupaten Sukoharjo melakukan evaluasi besar-besaran demi dongkrak nilai penilaian SAKIP Kabupaten Sukoharjo berada di ranking paling bawah di Jawa Tengah selama beberapa tahun terakhir. Pemkab Sukoharjo berupaya mengerek peringkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Jawa Tengah dengan nilai B pada tahun 2022. Akuntabilitas kinerja pemerintah di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) diperbaiki sepanjang 2021. (Sumber : Solopos.com tahun 2022).

Hasil penelitian dari Wardani dan Silvia (2021), Budiani (2021), Widaryanti dan Pancawardani (2020) menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berbanding sebaliknya dengan penelitian Pratama, Agustin dan Taqwa (2019), Anisa dan Haryanto (2022), Aprilianti, Wulan dan Kurniawan (2020) menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti bahwa anggaran yang disusun sesuai dengan kejelasan perencanaan akan membantu mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil penelitian Pratama, Agustin dan Taqwa (2019), Anisa dan

Haryanto (2022) menunjukkan bahwa Pengendalian Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berbanding sebaliknya dengan penelitian Hidayata, Putra dan Murialtia (2021), Budiani (2021), Widaryanti dan Pancawardani (2020) menunjukkan bahwa Pengendalian Akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti bahwa pengendalian akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah dapat membantu mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil Penelitian Israr (2022) menunjukan bahwa good governance berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berbanding sebaliknya dengan penelitian Hidayata, Putra dan Murialtia (2021), Noormansyah dan Sirkomba (2022) menunjukkan bahwa Good Governance tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti bahwa Good Governance yang diterapkan tidak dapat membantu mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Fenomena tidak konsistennya hasil dari penelitian terdahulu maka penelitian mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah masih dianggap sebuah masalah yang menarik untuk diteliti.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan Populasi penelitian ini mencakup seluruh pegawai (N=123) yang bertugas di seluruh perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo. Sampel penelitian ini berjumlah 92 responden dari populasi pegawai di seluruh UKPD di Kabupaten Sukoharjo. Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui beberapa tahap, yakni statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas instrumen, uji asumsi klasik, serta pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Hasil dan Pembahasan Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kejelasan sasaran anggaran	92	13	20	17,33	1,710
Pengendalian akuntansi	92	12	20	16,68	1,747
Good governance	92	13	20	17,25	1,855
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	92	12	20	17,01	1,807
Valid N (listwise)	92				

(Sumber: Data primer diolah, 2024)

Dari hasil analisis data di atas, maka dapat disimpulkan deskripsi masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Good Governance Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo
(Kusumaningsari, et al.)

1. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)
Hasil analisis deskriptif dapat dijelaskan bahwa nilai N atau jumlah data yang diteliti 92 sampel. Dalam penelitian ini nilai mean atau rata-rata variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 17,33 dibulatkan menjadi 17, dan standar deviasi sebesar 1.710.
2. Variabel Pengendalian Akuntansi (X2)
Hasil analisis deskriptif mengindikasikan bahwa ukuran sampel (N) dalam penelitian ini adalah 92 responden. Berdasarkan tanggapan responden terhadap empat item terkait variabel pengendalian akuntansi, diperoleh skor minimum sebesar 12 poin. Skor terendah ini berasal dari responden ke-88 yang secara konsisten memilih opsi “netral” untuk seluruh pernyataan. Sebaliknya, skor maksimum sebesar 20 poin dicapai oleh sebelas responden yang seluruhnya memberikan jawaban “sangat setuju”. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa rata-rata (mean) skor variabel pengendalian akuntansi adalah 16,68 (dibulatkan menjadi 17), dengan deviasi standar sebesar 1,747.
3. Variabel Good Governance (X3)
Hasil analisis deskriptif mengindikasikan bahwa ukuran sampel (N) dalam penelitian ini adalah 92. Analisis terhadap variabel *good governance*, yang terdiri dari empat indikator, menunjukkan skor minimum sebesar 13 yang diperoleh oleh responden ke-23, dengan skor terendah terkonsentrasi pada indikator kedua, ketiga, dan keempat. Sebaliknya, skor maksimum sebesar 20 dicapai oleh 22 responden yang memberikan respons "Sangat Setuju" pada seluruh indikator. Rata-rata (mean) skor variabel *good governance* adalah 17,25 (dibulatkan menjadi 17), dengan deviasi standar sebesar 1,855.
4. Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)
Analisis deskriptif menunjukkan bahwa ukuran sampel (N) dalam penelitian ini adalah 92 responden. Berdasarkan data yang diperoleh, rentang skor variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berada antara 12 hingga 20. Skor terendah (12) diperoleh dari responden ke-62, terutama pada item pertanyaan ke-3 dan ke-4. Sebaliknya, skor tertinggi (20) dicapai oleh 14 responden yang konsisten memberikan jawaban "Sangat Setuju" pada semua item terkait akuntabilitas kinerja. Nilai rata-rata (mean) variabel tersebut adalah 17,01 (dibulatkan menjadi 17), dengan standar deviasi sebesar 1,807.

2) Hasil dan Pembahasan Uji Instrumen Penelitian

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

No.	Variabel	Item	p-value (signifikansi)	Kriteria	Keterangan
1	Kejelasan Sasaran Anggaran	X1.1	0,000	$\alpha=0,05$	Valid
		X1.2	0,000	$\alpha=0,05$	Valid
		X1.3	0,000	$\alpha=0,05$	Valid

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Good Governance Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo
(Kusumaningsari, et al.)

		X1.4	0,000	$\alpha=0,05$	Valid
2	Pengendalian Akuntansi	X2.1	0,000	$\alpha=0,05$	Valid
		X2.2	0,000	$\alpha=0,05$	Valid
		X2.3	0,000	$\alpha=0,05$	Valid
		X2.4	0,000	$\alpha=0,05$	Valid
3	Good Governance	X3.1	0,000	$\alpha=0,05$	Valid
		X3.2	0,000	$\alpha=0,05$	Valid
		X3.3	0,000	$\alpha=0,05$	Valid
		X3.4	0,000	$\alpha=0,05$	Valid
4	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Y.1	0,000	$\alpha=0,05$	Valid
		Y.2	0,000	$\alpha=0,05$	Valid
		Y.3	0,000	$\alpha=0,05$	Valid
		Y.4	0,000	$\alpha=0,05$	Valid

(Sumber: Data primer diolah, 2024)

Analisis data kuantitatif menunjukkan bahwa seluruh item dalam kuesioner penelitian (X1.1-Y.4) memiliki nilai signifikansi ($p < 0.05$), mengindikasikan validitas konstruk setiap item.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	R_{α}	R_{kritis}	Kriteria
1	Kejelasan Sasaran Anggaran	0,845	0,60	Reliabel
2	Pengendalian Akuntansi	0,817	0,60	Reliabel
3	Good Governance	0,856	0,60	Reliabel
4	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0,824	0,60	Reliabel

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Good Governance Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo
(Kusumaningsari, et al.)

(Sumber: Data primer diolah, 2024)

Berdasarkan paparan data pada tabel di atas, analisis reliabilitas dilakukan terhadap seluruh item pernyataan yang telah dinyatakan valid. Suatu variabel dapat dikategorikan reliabel apabila respon responden terhadap pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan tingkat konsistensi yang tinggi. Hasil perhitungan koefisien reliabilitas menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran ($\alpha = 0,845$), pengendalian akuntansi ($\alpha = 0,817$), good governance ($\alpha = 0,856$), dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ($\alpha = 0,824$) memiliki nilai koefisien alpha di atas ambang batas 0,60. Temuan ini mengindikasikan bahwa keempat variabel tersebut dapat diandalkan untuk mengukur konstruk.

3) Hasil dan Pembahasan Uji Asumsi Klasik

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3,424	1,690		2,026	0,046		
Kejelasan sasaran anggaran	0,234	0,110	0,222	2,138	0,035	0,596	1,677
Pengendalian akuntansi	0,209	0,103	0,202	2,034	0,045	0,652	1,533
Good governance	0,350	0,101	0,360	3,485	0,001	0,603	1,657

a. Dependent Variable: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

(Sumber: Data primer diolah, 2024)

Berdasarkan tabel di atas, nilai toleransi untuk variabel kejelasan sasaran anggaran (0,596), pengendalian akuntansi (0,652), dan good governance (0,603) berada di atas ambang batas 0,10. Hasil perhitungan VIF menunjukkan bahwa nilai untuk variabel kejelasan sasaran anggaran (1,677), pengendalian akuntansi (1,533), dan good governance (1,657) berada di bawah ambang batas 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinearitas yang signifikan antar variabel bebas dalam model regresi ini. Semua variabel tersebut dapat dianggap independen dan layak digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,629	1,147		0,548	0,585
Kejelasan sasaran anggaran	0,017	0,074	0,032	0,234	0,815
Pengendalian akuntansi	-0,040	0,070	-0,075	-0,567	0,572
Good governance	0,042	0,068	0,083	0,610	0,544

a. Dependent Variable: ABRESID

(Sumber: Data primer diolah, 2024)

Analisis heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser dengan bantuan SPSS menunjukkan bahwa nilai probabilitas (p-value) untuk variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), Pengendalian Akuntansi (X2), dan Good Governance (X3) secara berturut-turut adalah 0,815, 0,572, dan 0,544. Berdasarkan kriteria signifikansi 5%, hasil ini mengindikasikan tidak adanya pelanggaran asumsi homoskedastisitas pada model regresi yang dikembangkan. Temuan ini konsisten dengan pendapat Ghozali (2013) yang menyatakan bahwa jika nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		92
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,000000
	Std. Deviation	1,35880974
Most Extreme Differences	Absolute	0,112
	Positive	0,112
	Negative	-0,093
Test Statistic		0,112
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,007 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	0,190 ^d
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	0,180
	Upper Bound	0,200

(Sumber: Data primer diolah, 2024)

Analisis distribusi data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan SPSS menghasilkan nilai signifikansi asimtotik sebesar 0,007, lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa data tidak memenuhi asumsi normalitas. Oleh karena itu, dilakukan uji lanjutan menggunakan metode Monte Carlo. Hasil uji Monte Carlo menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,190, lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, yang mengindikasikan bahwa data residual telah memenuhi asumsi normalitas.

4) Hasil dan Pembahasan Uji Asumsi Klasik

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,424	1,690		2,026	0,046
Kejelasan sasaran anggaran	0,234	0,110	0,222	2,138	0,035
Pengendalian akuntansi	0,209	0,103	0,202	2,034	0,045
Good governance	0,350	0,101	0,360	3,485	0,001

a. Dependent Variable: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

(Sumber: Data primer diolah, 2024)

Berdasarkan model regresi linear berganda, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 3,424 + 0,234X_1 + 0,209X_2 + 0,350X_3 + e.$$

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Good Governance Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo
(Kusumaningsari, et al.)

Persamaan ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan positif antara kejelasan sasaran anggaran (X1), pengendalian akuntansi (X2), dan good governance (X3) dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa peningkatan satu satuan pada masing-masing variabel akan berasosiasi dengan peningkatan nilai Y, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa faktor-faktor internal seperti kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi, serta faktor eksternal seperti good governance, memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja organisasi publik.

**Tabel 8. Hasil Uji t
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,424	1,690		2,026	0,046
Kejelasan sasaran anggaran	0,234	0,110	0,222	2,138	0,035
Pengendalian akuntansi	0,209	0,103	0,202	2,034	0,045
Good governance	0,350	0,101	0,360	3,485	0,001

a. Dependent Variable: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

(Sumber: Data primer diolah, 2024)

Analisis statistik menunjukkan bukti empiris yang signifikan ($p = 0.035$) mengenai pengaruh positif variabel kejelasan sasaran anggaran (X1) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Hasil uji-t ($t = 2.138$, $p < 0.05$) menolak hipotesis nol dan mendukung hipotesis alternatif, mengindikasikan hubungan kausal antara kedua variabel. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel pengendalian akuntansi (X2) memiliki pengaruh signifikan ($p = 0.045$) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Nilai t hitung ($t = 2.034$) lebih besar dari t tabel, sehingga hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Variabel good governance (X3) memiliki pengaruh yang sangat signifikan ($p < 0.001$) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Hasil uji-t ($t = 3.485$) menunjukkan bukti kuat mengenai hubungan kausal antara kedua variabel.

**Tabel 9. Hasil Uji F
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	128,970	3	42,990	22,516	0,000 ^b
	Residual	168,019	88	1,909		
	Total	296,989	91			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

a. Predictors: (Constant), Good governance, Pengendalian akuntansi, Kejelasan sasaran anggaran

(Sumber: Data primer diolah, 2024)

Analisis regresi menunjukkan adanya pengaruh simultan yang signifikan (F hitung = 22,516; $p <$

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Good Governance Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo
(Kusumaningsari, et al.)

0,05) dari variabel independen, yakni Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Good Governance, terhadap variabel dependen, yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	Model Summary			
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,659 ^a	0,434	0,415	1,382

a. Predictors: (Constant), Good governance, Pengendalian akuntansi, Kejelasan sasaran anggaran

(Sumber: Data primer diolah, 2024)

Berdasarkan hasil tabel di atas, nilai koefisien determinasi (R -squared) sebesar 0,415 mengindikasikan bahwa variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Good Governance secara bersama-sama menjelaskan sekitar 41,5% varians dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sisanya, yakni 58,5%, dapat diatribusikan pada faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

5) Hasil dan Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,035 < 0,05 dan hasil dari t hitung sebesar 2,138, artinya ada pengaruh positif dan signifikan Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Sehingga hipotesis yang pertama yang berbunyi: “Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” terbukti kebenarannya. Mengacu pada teori agensi (agency theory), pemerintah sebagai agen mempunyai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap sasaran anggaran yang jelas kepada masyarakat sebagai principal yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik kejelasan sasaran anggaran maka semakin baik juga tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Wardani dan Silvia (2020). Hasil yang sama dilakukan pada penelitian Budiani (2021) dan Widaryanti, Pancawardani (2020).

Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil pada penelitian ini diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0,045 < 0,05 dan t hitung sebesar 2,034 yang berarti ada pengaruh positif dan signifikan pengendalian akuntansi (X_2) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Sehingga hipotesis kedua yang berbunyi: “Pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah” terbukti kebenarannya. Hasil penelitian ini mengindikasikan adanya korelasi positif yang signifikan antara pengendalian akuntansi dan tingkat akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo. Temuan ini mengisyaratkan bahwa mekanisme pengendalian akuntansi telah diterapkan secara optimal dalam pengelolaan sumber daya organisasi, yang tercermin dari pemanfaatan sumber daya yang ekonomis,

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Good Governance Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo
(Kusumaningsari, et al.)

efisien, dan efektif serta kualitas jejak audit yang memadai. Dengan kata lain, semakin baik penerapan pengendalian akuntansi, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah, sehingga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan daerah dapat ditingkatkan. Dengan demikian penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa pengendalian akuntansi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Pratama, Agustin, dan Taqwa (2019). Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Anisa dan Haryanto (2022) juga menunjukkan hasil bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Good Governance terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dan hasil dari t hitung sebesar 3,845, artinya ada pengaruh positif dan signifikan good governance (X_3) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Sehingga hipotesis yang pertama yang berbunyi: “Good governance berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” terbukti kebenarannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa good governance berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Sukoharjo yang pada hakikatnya penerapan good governance sebagai tata kelola yang baik serta tepat pada setiap perangkat daerah sehingga dapat meningkatkan kinerja suatu pemerintah daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Sukoharjo telah menerapkan good governance, sehingga dalam pelayanan terhadap masyarakat dapat dikatakan sudah baik. Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa good governance memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Israr, 2022). Hasil berbeda dengan hasil penelitian (Noormansyah dan Sirkomba, 2022) yang menyatakan bahwa good governance tidak berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

KESIMPULAN

1. Tingkat kepastian dalam penentuan target anggaran memiliki korelasi positif yang kuat dengan tingkat akuntabilitas kinerja lembaga publik. Implikasinya, semakin jelas sasaran anggaran yang ditetapkan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas kinerja lembaga tersebut.
2. Mekanisme pengendalian akuntansi berperan krusial dalam meningkatkan tingkat akuntabilitas kinerja lembaga publik. Dengan kata lain, semakin efektif sistem pengendalian akuntansi yang diterapkan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas kinerja lembaga tersebut.
3. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja lembaga publik. Semakin baik penerapan prinsip-prinsip good governance, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas kinerja lembaga publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, I. N., & Haryanto. 2022. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Akuntansi Aktual*, 9(1), 77–85.
- Aprilianti, D., Wulan, M., & Kurniawan, H. 2020. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 9(2).
- Budiani, L. V. 2021. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–19.
- Hidayata, T., Putria, A. M., & Murialtia, N. 2021. "Pengaruh Good Governance, Kompetensi, Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar". *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Bisnis & Akuntansi*, 1, 87–97.
- Israr, N. H., & Syofya, E. 2022. "Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Penerapan Good Governance terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi". *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4(4), 686–697.
- Jensen, M. C. dan Meckling, M. H. 1976. "Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*. Vol. 3, No. 4, Hal. 305-360.
- Lembaga Administrasi Negara-LAN. 1999. Keputusan Kepala LAN No. 589/IX/6/Y/1999. *Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Andi. Yogyakarta.
- Noormansyah, I., & Sirkomba, H. A. 2022. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi ASN, dan Penerapan Good Governance Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 618–627.
- Pratama, R., Agustin, H., & Taqwa, S. 2019. "Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah". *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 429–444.
- Wardani, N. D., & Silvia, D. 2021. "Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung". *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya*, 6(1), 47–56.
- Widaryanti, & Pancawardani, N. L. 2018. "Analisis Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah". *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 15(32), 477–492.